

**Peran ASEAN dalam Upaya Penyelesaian Konflik Kuil Preah Vihear antara  
Thailand dan Kamboja**

*The Role of ASEAN in an Effort to Resolving the Preah Vihear Temple Conflict between  
Thailand and Kamboja*

**Oleh :**

**Ivani Yuhendra Nisa**

**20120510334**

**Jurusan Ilmu Hubungan Internasional**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Politik**

*Email : ivani.yuhendra.2012@fisipol.umy.ac.id*

**ABSTRACT**

*Preah Vihear is Hindu temple where located on the border of Thailand and Cambodia which is in 1962 the International Court of Justice (ICJ) decided that the temple was included in the region of Cambodia. Then on July 7, 2008, UNESCO officially included Preah Vihear as a world heritage. It was the beginning of which Thailand began to re-measure the temple area which belongs to Cambodia. According to Thailand, an area of 4.6 km<sup>2</sup> located around the temple was not mentioned in the ICJ's decision in 1962. Thailand also sent troops to stand guard there and Cambodia responded by sending troops and eventual armed conflict occurred between the two armies countries.*

*ASEAN as a regional organization of the countries in Southeast Asia, including Thailand and Cambodia asked the United Nations to cooperate in resolving the conflict*

*between the two countries. Where to resolve this conflict must be conducted peacefully and without using violence. In this regard, ASEAN also as facilitator and moderator in Preah Vihear resolve conflicts through negotiation and mediation.*

*To resolve this conflict, ASEAN facilitated the trilateral meetings between Indonesia, Thailand and Cambodia that took place in Jakarta. On the other hand, ASEAN mediated with Thailand and Cambodia in the Joint Border Committee (JBC), the ASEAN Summit and the 18<sup>th</sup>, ASEAN Defence Ministers Meeting (ADMM) and ASEAN Ministerial Meeting (AMM)*

*Keywords : Preah Vihear, konflik, Thailand, Kamboja, ASEAN*

## **Pendahuluan**

Thailand dan Kamboja awalnya memiliki hubungan yang baik dan jarang terlibat pertikaian satu sama lain namun hubungan itu mulai renggang pasca terjadinya Perang Indochina pada tahun 1975. Hubungan kedua Negara itu semakin memburuk dikarenakan perebutan kepemilikan Kuil Preah Vihear pada tahun 2008. Dimana Kuil Preah Vihear sendiri adalah kuil Hindu kuno yang dibangun pada masa Kerajaan Khmer. kuil yang dibangun pada abad ke-9 hingga ke-12 oleh Raja Suryavarman I dan Raja Suryavarman II pada Kekaisaran Khmer yang berlokasi di Pey Tadi yang berjarak 525 meter dari Gunung Dângrêk yang memisahkan Kamboja dan wilayah Sisaket di bagian timur Thailand. Kuil Preah Vihear dibangun oleh suku Khmer dan merupakan kuil terbesar pada abad ke-9. Suku Khmer adalah suku asli Kamboja yang mendiami bagian barat dan tengah dari Kamboja. Suku Khmer tersebar dari Kamboja, Thailand dan Vietnam. Rata-rata suku Khmer adalah penganut Buddhisme, animisme dan Hindu maka dari itu tidak

heran, suku Khmer mendirikan kuil Preah Vihear sebagai salah satu wadah mereka untuk berdoa. Didalam kuil ini, bisa ditemukan arsitektur khas suku Khmer yang mana dulunya kuil ini dibangun untuk tempat sembahyang dan hidup petapa-petapa yang berada di Pegunungan Dangrek.

Pada 7 Juli 2008, Kuil Preah Vihear secara resmi kedalam daftar warisan dunia berdasarkan pertemuan *World Heritage Committee* di Quebec, Kanada. Penetapan ini dikarenakan Kuil Preah Vihear memiliki kriteria bangunan dan detail dekorasi yang dibangun oleh Suku Khmer yang dinilai sangat luar biasa. Hal ini membuat permasalahan yang awalnya hanya sebatas sengketa mulai berubah menjadi konflik bersenjata. Thailand pun mempertanyakan wilayah di sekitar Preah Vihear yang berukuran 4,6 km<sup>2</sup> yang tidak dijelaskan dalam keputusan Mahkamah Internasional. (Indonesia 2011). Konflik yang awalnya hanya sekedar sengketa berubah menjadi konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja. Hal ini ditandai dengan penempatan tentara Thailand di wilayah kuil pada Juli 2008. Kamboja yang merasa teritorialnya terancam mulai melakukan hal yang sama. Kamboja mengirim tentaranya di wilayah kuil guna menghalangi tentara Thailand. Jumlah tentara Thailand dan Kamboja yang berjaga di sekitar kuil sekitar 4000 orang.

Melihat tidak kunjung selesainya sengketa ini, PBB memanggil ASEAN pada Februari 2011 yang kala itu diwakili oleh Indonesia. Disini PBB menunjuk ASEAN sebagai pihak ketiga yang menjadi penengah dalam upaya penyelesaian sengketa. Dalam hal ini, ASEAN serta PBB mencoba menciptakan satu kondisi yang kondusif untuk dialog bilateral antar kedua Negara. ASEAN merasa ikut bertanggung jawab untuk menyelesaikan sengketa perbatasan yang terjadi diantara kedua Negara karena kedua

Negara ini sama-sama merupakan bagian dari anggota ASEAN. Selain karena ikut bertanggung jawab, ASEAN juga bersikap tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan Thailand dan Kamboja dalam ASEAN Charter. Maka dari itu, ASEAN pun mengupayakan jalan diplomasi, diskusi dan lain-lain yang sifatnya *non military* untuk menuntaskan sengketa ini. Agar kedepannya hubungan kedua Negara ini bisa membaik dan tidak mengganggu kinerja mereka didalam agenda ASEAN. Sebelumnya, ASEAN telah memiliki beberapa track record terkait penyelesaian sengketa di dalam regional Asia Tenggara yaitu sengketa Sipadan dan Ligitan, konflik Sabah dan konflik Kamboja dan Vietnam.

## **Kerangka Dasar Teori**

### **A. Teori Resolusi Konflik**

Menurut Mindes resolusi konflik merupakan kemampuan untuk menyelesaikan perbedaan dengan yang lainnya dan merupakan aspek penting dalam pembangunan sosial dan moral yang memerlukan keterampilan dan penilaian untuk bernegosiasi, kompromi serta mengembangkan rasa keadilan. Sementara itu dari buku Jurnal Penelitian Politik dijelaskan bahwa resolusi konflik ialah upaya untuk menangani sebab-sebab konflik dan seraya berusaha membangun hubungan baru yang bisa bertahan lama di antara kelompok-kelompok yang bermusuhan. Maka dari itu resolusi konflik merupakan suatu terminologi ilmiah yang menekankan kebutuhan untuk melihat bahwa perdamaian itu adalah sesuatu yang bersifat terbuka dan demokratis. (Politik 2007)

Dalam resolusi konflik inipun, Johan Galtung mendeskripsikan tiga pendekatan untuk mencapai perdamaian yakni:

a. *Peacemaking*

Yakni proses yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan perdamaian dengan memakai jalan-jalan yang persuasif, seperti negosiasi, perundingan, musyawarah dengan para pimpinan yang memiliki wewenang. Bila dikaitkan dengan kasus Preah Vihear, para pemimpin dari pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan dengan pihak ketiga. Dalam hal ini, pihak ketiga adalah dua atau lebih individu yang berusaha membantu menyelesaikan konflik tanpa memihak salah satu dari pihak-pihak yang bersengketa. (Kim 2004)

Adapun bentuk-bentuk *peacemaking* dapat berupa:

1) Fasilitasi

Fasilitator adalah seseorang yang membantu sekelompok orang memahami tujuan bersama mereka dan membantu mereka membuat rencana guna mencapai tujuan tersebut tanpa mengambil posisi tertentu dalam diskusi. Dalam hal ini yang dimaksud dengan seseorang adalah ASEAN, sementara sekelompok orang merupakan pihak dari Thailand dan Kamboja. Dalam hal ini, fasilitator bertindak sebagai pihak yang menyediakan fasilitas atau sarana agar proses pembuatan rencana dengan sekelompok orang tersebut bisa berjalan dengan lancar. Rencana yang dimaksud adalah bekerja sama, pengambilan keputusan atau bahkan membantu proses perdamaian. Dalam menjalankan proses rencana fasilitator hanya bertindak sebagai pihak ketiga dan tidak memihak kubu manapun karena tugas utamanya hanyalah membantu agar rencana bisa dijalankan dengan baik.

## 2) Mediasi

Adalah proses penyelesaian suatu masalah antara pihak-pihak yang bersengketa dengan melibatkan kehadiran pihak ketiga yang berisfat netral. Dalam hal ini, netral adalah seseorang yang tidak memihak kubu manapun yang tengah bersengketa. Mediator adalah seseorang yang menjadi pihak penengah atau ketiga yang mengambil peran tertentu dalam suatu konflik tertentu di masyarakat. Persamaan antara fasilitator dan mediator adalah keduanya sama-sama tidak berwenang memaksakan keputusan mengenai konflik tertentu dan keduanya sama-sama mengeluarkan keputusan yang bisa diterima kedua belah pihak yang berseteru.

Sementara itu, perbedaannya ialah fasilitator lebih bersifat umum dimana bidang yang ditangani tidak hanya satu saja sementara mediator lebih mengarah pada penyelesaian konflik. Selain itu fasilitator hanya terbatas pada pembicaraan antara kedua belah mengenai keluhan serta kondisi masalah yang berlangsung sementara mediator dibahas lebih mendalam mulai dari mencari titik permasalahan dari konflik yang terjadi, membantu setiap pihak agar mengakui legitimasi kepentingan pihak lain, membantu mengidentifikasi kepentingan bersama, melokalisir konflik kedalam isu, waktu dan tempat yang spesifik dan memfasilitasi komunikasi antar kedua belah pihak.

### 3) Arbitrasi

Adalah pelaksanaan penyelesaian sengketa di luar Peradilan Umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang telah disetujui oleh pihak-pihak yang bersengketa. Kesepakatan yang tertulis dalam perjanjian arbitrase berisi pokok permasalahan, jumlah yang harus dibayar dan pelaksanaan isi perjanjian. Setelah itu, para pihak masih harus membuat sebuah perjanjian tertulis lain, yaitu perjanjian penunjukan arbiter. Di sini para pihak diberi pilihan antara menunjuk arbiter tunggal atau beberapa arbiter. Dalam perjanjian penunjukan arbiter ini, salah satu yang dibahas adalah biaya arbitrase dan honorarium arbiter.

#### *b. Peacekeeping*

Yakni proses yang tujuannya untuk menghentikan ataupun mengurangi segala bentuk intervensi dari pihak-pihak yang bersengketa. Sehingga tidak perlu ada lagi segala bentuk kekerasan militer yang terjadi antara kedua pihak. Dengan kata lain, cara ini dilaksanakan dengan mediasi serta negosiasi antara kedua belah pihak.

#### *c. Peacebuilding*

Usaha melakukan pengurangan akar permusuhan diantara kedua belah pihak dimana dengan melakukan perubahan rekonstruksi social, ekonomi dan politik akibat adanya sengketa ini. (Galtung 1976) Sehingga permusuhan yang dulunya selalu melibatkan kekerasan dapat diubah dan masyarakat bisa merasakan perdamaian di daerah objek sengketa.

## **B. Konsep ASEAN Way**

*ASEAN Way* adalah pendekatan khusus yang digunakan ASEAN dalam menyelesaikan konflik. Hal ini didasarkan pada kepentingan bersama dalam perdamaian, keharmonisan, dan kestabilan regional, dimana negara-negara ASEAN saling berinteraksi dan memiliki norma bersama. Dalam hal ini, jika terjadi suatu konflik diantara Negara-negara anggota ASEAN maka cara yang harus ditempuh harus memiliki semangat ASEAN yaitu melalui pendekatan-pendekatan diplomasi yang bersifat kompromi yang dilakukan dalam suasana musyawarah mufakat. (Djafar 2011)

Musyawarah atau konsultasi dan mufakat atau konsensus adalah istilah yang digunakan dalam diplomasi ASEAN.

Pendekatan diplomasi semacam ini bukanlah mencari keuntungan dari pihak yang berselisih, tetapi mencari titik temu dari berbagai perbedaan pandangan yang ada menjadi satu persamaan berpikir dalam menyikapi permasalahan dengan berprinsip demi keutuhan ASEAN. Mengakomodasikan hubungan yang baik diantara Negara-negara anggota ASEAN jelas memerlukan suatu proses diplomasi yang fleksibel, dinamis dan dapat diterima anggota ASEAN tanpa adanya suatu paksaan dari pihakpun atau merasa terpaksa. Melalui pertemuan dan dialog para pelaku politik luar negeri Negara-negara anggota ASEAN, cara kompromi dilakukan untuk mencari penyelesaian suatu konflik yang terjadi.

Dengan demikian, segala permasalahan yang melibatkan Negara-negara anggota ASEAN dapat ditangani dengan bermusyawarah untuk mencapai suatu mufakat yang



dapat diterima oleh semua Negara anggota ASEAN.

Untuk menghindari konflik, ASEAN bergantung pada negosiasi informal dan ringan. ASEAN menjadi contoh dalam keamanan yang kooperatif, yang menekankan kepada dialog dan konsultasi. Ada beberapa karakteristik dari ASEAN Way ini yakni tidak menggunakan cara memaksa dalam upaya penyelesaian konflik, adanya kekuasaan regional oleh semua Negara anggota dan penyelesaian masalah regional yang dilakukan secara regional pula, harus adanya doktrin *non-inteference* oleh semua anggota dan tidak memakai campur tangan militer dan lebih mengutamakan jalan bilateral atau komunikasi dua arah.

Adapun pengaplikasian *ASEAN Way* memiliki dua *strategic goals* yakni

- a. Tidak membiarkan perselisihan antara dua negara/ bilateral mengganggu kestabilan regional dan fungsi ASEAN itu sendiri.
- b. Tidak membiarkan isu bilateral antara ASEAN dengan negara non-ASEAN memberikan dampak negatif pada hubungan di dalam ASEAN sendiri.

Maka dari itu, ASEAN pun berperan sebagai peacemaker dalam upaya penyelesaian konflik Preah Vihear antara Thailand dan Kamboja dengan melakukan fasilitasi dan mediasi. Dimana fasilitasi ini berupa ASEAN memfasilitasi pertemuan triteral antara Indonesia, Thailand dan Kamboja. Sementara mediasi berupa mengadakan pertemuan yang melibatkan Thailand dan Kamboja dengan memasukkan kasus Preah Vihear ke dalam agenda pertemuan-pertemuan ASEAN.

## **Metode Penelitian**

Dalam pengumpulan data untuk penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode yang bersifat literasi atau metode penelitian yang didasarkan pada riset kepustakaan (*library research*). Riset kepustakaan ini yaitu teknik pengumpulan data dengan mempelajari berbagai macam literatur seperti buku, jurnal, majalah, koran yang berkaitan dengan penelitian. Selain itu, penulis juga memperoleh data-data dari media internet sebagai sarana pendukung utama serta sumber-sumber lain yang relevan dan valid yang dapat mendukung penulisan skripsi ini.

## **Pembahasan**

### **1. ASEAN memfasilitasi pertemuan triteral antara Indonesia, Thailand dan Kamboja**

ASEAN diwakili oleh Indonesia yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua ASEAN yang bertindak sebagai fasilitator yang menjadi pihak ketiga untuk menyelesaikan konflik Thailand dan Kamboja. Untuk menjalin komunikasi diantara kedua negara tersebut, ASEAN pun menerapkan *shuttle diplomacy*. *Shuttle diplomacy* atau diplomasi ulang alik atau diplomasi pulang pergi adalah istilah dalam diplomasi dimana proses negosiasi dilakukan dengan bantuan perantara atau orang ketiga sehingga tidak ada kontak secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa. Dalam *shuttle diplomacy*, pihak ketiga atau perantara yang terlibat merupakan pihak yang dipercaya dan bersifat netral atau tidak memihak kubu manapun. Dalam hal ini, pihak ketiga itu adalah ASEAN yang diwakili oleh Indonesia.

Marty Natalegawa selaku wakil ASEAN menjadi pihak ketiga atau perantara yang mengunjungi Thailand dan Kamboja dalam waktu yang berbeda untuk membicarakan masalah Preah Vihear. Marty Natalegawa mengunjungi Thailand dan Kamboja selama

dua hari. Marty Natalegawa mengunjungi, Menlu Kamboja Hor Nam Hong di Phnom Penh dan Menlu Thailand Kasit Piromya di Bangkok untuk mendapatkan informasi serta keluhan dari pihak-pihak yang bersengketa. Selain itu, Thailand dan Kamboja sepakat untuk merundingkan masalah perbatasan ini di Markas PBB, New York, Amerika Serikat. Perundingan yang dilaksanakan pada 10 Februari 2011 inipun dihadiri oleh Marty Natalegawa sebagai wakil dari ASEAN, Menlu Kamboja dan Menlu Thailand yang juga merupakan anggota PBB. dalam perundingan ini, PBB menegaskan kepada Thailand dan Kamboja agar menarik pasukan dari daerah konflik dan untuk merealisasikan keputusannya tersebut, PBB menempatkan beberapa tim peninjau untuk mengawasi bila serangan datang lagi dari pasukan kedua belah pihak.

Kemudian, pertemuan di Markas PBB inipun diteruskan kedalam *Informal ASEAN Foreign Minister's Meeting* yang dihadiri oleh Menlu ASEAN dengan pembahasan tunggal yakni konflik Preah Vihear. Kedua Negara yang bertikai telah sepakat dalam tiga koridor yaitu dialog perdamaian melalui mekanisme TAC, gencatan senjata permanen dan pelibatan ASEAN dalam menengahi konflik. Selain itu Indonesia pun menawarkan *package solution* untuk mengupayakan perdamaian Thailand dan Kamboja. Adapun tiga package solution yang ditawarkan oleh Indonesia adalah

### **Langkah 1**

- a. Pertukaran surat *term of reference* (TOR) pada dikirimnya tim *observer* ke daerah yang menjadi objek sengketa
- b. Pertemuan *General Border Commission* (GBC) dan *Joint Border Committee* (JBC)

**Langkah 2 (lima hari sesudah langkah 1 dilaksanakan)**

- a. Mengirimkan tim *observer* ke daerah yang menjadi objek sengketa
- b. Pelaksanaan General Border Commission (GBC) dan *Joint Border Committee* (JBC)

**Langkah 3 (10 hari paska dilaksanakannya langkah 1)**

- a. Menugaskan tim *observer* di daerah yang menjadi objek sengketa
- b. Melaksanakan hasil dari pertemuan *General Border Commission* (GBC) dan *Joint Border Committee* (JBC)

**2. ASEAN mengadakan mediasi melibatkan Thailand dan Kamboja dengan memasukkan kasus Preah Vihear ke dalam agenda pertemuan-pertemuan ASEAN.**

Selain memfasilitasi pertemuan triteral antara Indonesia , Thailand dan Kamboja, ASEAN pun menjadi mediator atau perantara Thailand dan Kamboja dengan memasukkan konflik Preah Vihear sebagai agenda bahasan.

a. *Joint Border Committee* (JBC)

Adalah komite yang mengatur semua permasalahan di kawasan , mulai masalah ekspor-impor , lintas batas suatu negara , keamanan perbatasan hingga daerah konservasi. JBC pun digelar di Istana Bogor, Indonesia sebagai bentuk dari tindak lanjut pertemuan informal menteri yang dilaksanakan di Jakarta. JBC dilaksanakan dari 7-8 Februari 2011 untuk membahas masalah konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja yang difasilitasi oleh Indonesia , selaku Ketua ASEAN. Pertemuan yang diberi judul "*The Thailand–Cambodia Joint Commission on the Demarcation for Land Boundary* (JBC)" ini tidak dihadiri oleh Menlu Thailand padahal Menlu

Kamboja, Hor Nam Hong sudah tiba di Jakarta pada 6 Februari 2011. Padahal masih banyak pembahasan mengenai TOR *timobserver* yang berniat memantau objek sengketa. Ketidakhadiran Thailand dalam JBC inipun membuktikan bahwa Thailand tidak bisa bekerja sama dengan *package solution* yang ditawarkan Indonesia untuk meredakan ketegangan antara Thailand dan Kamboja. Thailand pun memberikan alasan melalui Menteri Pertahanan Thailand, Prawit Wangsuwan mengenai ketidakhadirannya di JBC dikarenakan Thailand menolak *timobserver* yang akan datang di daerah objek sengketa karena hal itu dianggap sebagai bentuk campur tangan atau intervensi. Padahal di dalam prinsip ASEAN terdapat prinsip *non-intervention* dimana tidak boleh adanya campur tangan pihak luar dalam masalah dalam negeri negara tertentu tanpa adanya izin dari negara tersebut. Dalam hal ini, izin untuk *tim observer* hanya diberikan oleh pihak Kamboja. (Nur 2011)

b. Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-18

Upaya awal ASEAN untuk menyelesaikan konflik Preah Vihear yang pada saat itu bukan lagi sekedar sengketa wilayah tetapi telah berubah menjadi konflik bersenjata ialah memasukkan masalah ini menjadi salah satu agenda dalam Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN (KTT ASEAN) pada 7 – 8 Mei 2011 yang dilaksanakan di Jakarta. KTT ASEAN ini menjadi forum resmi pertama untuk membahas masalah Thailand dan Kamboja. Pada pernyataan secara tertulis, para pemimpin negara anggota ASEAN sepakat satu suara untuk dilakukannya usaha damai dan tanpa kekerasan. Selain pendapat tertulis, ASEAN pun menunjuk Indonesia sebagai wakil ASEAN untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara Thailand dan Kamboja. Dari hasil KTT ASEAN ke-18 ini menghasilkan 10

keputusan sebagai langkah ASEAN untuk kedepannya dimana salah satunya berisi tentang konflik Preah Vihear yakni harus adanya Penyelesaian dan Manajemen Konflik (*Conflict Resolution and Management*) yang dilaksanakan di kawasan. Hal ini berkaitan dengan isu persengketaan wilayah antara Thailand dan Kamboja.

Dengan adanya *Conflict Resolution and Management*, diharapkan bisa dibangun suatu manajemen konflik yang bisa menjembatani komunikasi yang kondusif antara kedua negara sehingga bisa tercipta negosiasi yang akhirnya bisa menghasilkan *win-win solution*. Tetapi keputusan yang dihasilkan dari KTT ASEAN ini dianggap mengalami jalan buntu karena baik dari Thailand ataupun Kamboja tetap tidak menghentikan gencatan senjata yang ada. Namun, Marty Natalegawa selaku Menteri Luar Negeri Indonesia yang menjadi ketua ASEAN pada saat itu menolak mengatakan bahwa hasil KTT ASEAN gagal, ia menyatakan bahwa dengan adanya hasil ini akan mempertegas dan membuka jalan diplomasi yang lain untuk menyelesaikan konflik antara Thailand dan Kamboja. (Armadita 2011)

c. *ASEAN Defence Minister Meeting (ADMM)* dan *ASEAN Ministerial Meeting (AMM)*

Merupakan pertemuan Menteri Pertahanan negara-negara anggota ASEAN yang biasanya dilaksanakan sekali dalam setahun. ADMM ini menjadi bagian dalam pembentukan *ASEAN Political Security Community (APSC)*. ADMM dibentuk pada Juli 2005 yang merupakan hasil pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-38 di Vientiane. ADMM lebih mengarah kepada mekanisme konsultasi dan kerja sama yang bertujuan untuk mengeratkan kepercayaan antar sesama negara anggota dan

kepercayaan diri sehingga meningkatkan sifat terbuka dan transparansi antar anggota. Topik yang biasanya dibahas mengenai isu-isu pertahanan serta tantangan pertahanan ASEAN di masa mendatang. (ASEAN 2016)

Isu konflik Thailand dan Kamboja dimasukkan sebagai pembicaraan ADMM 19 Mei 2011 yang dilaksanakan di Jakarta. ADMM ke-5 2011 yang memiliki tema “*Strengthening Defence Cooperation of ASEAN and the Global Community to Face New Challenges*” dimana Menteri Pertahanan Indonesia , Purnomo Yusgiantoro sebagai ketua ADMM pada saat itu. Menhan Thailand, Prawit Wongsuwon dan Menhan Kamboja, Tea Banh hadir dalam ADMM di Jakarta. Kehadiran kedua Menhan inipun diharapkan mampu menghasilkan kesepakatan final akan konflik yang terjadi antara keduanya.

Dari pertemuan ADMM dilanjutkan ke *ASEAN Ministerial Meeting* (AMM). AMM merupakan pertemuan para menteri anggota ASEAN yang dimulai pada 1967. AMM ke-44 yang dilaksanakan pada 19 Juli 2011 di Nusa Dua, Bali membahas mengenai konflik Preah Vihear. Dimana keputusan AMM adalah adanya keterlibatan ICJ dalam konflik ini. ICJ mengeluarkan keputusan bahwa kedua negara harus menarik pasukannya masing-masing dari daerah sengketa dan juga penugasan terhadap *tim observer* di perbatasan.

Setelah proses panjang yang dilakukan oleh ASEAN untuk berperan penuh dalam mendamaikan Thailand dan Kamboja, hasil didapatpun masih belum memuaskan karena baik Thailand dan Kamboja masih agak susah untuk bekerja sama dengan cara-cara *non-military* yang ditawarkan oleh Indonesia. Kemudian, ASEAN lebih menyerahkan solusi konflik ini kepada kedua belah pihak apalagi ketika Yingluck

Shinawatra terpilih menjadi Perdana Menteri Thailand yang baru pada Agustus 2011, hubungan kedua negara tersebut mulai perlahan memulih. Yingluck Shinawatra dan pemimpin Kamboja, Hun Sen pun mengadakan pertemuan di Phnom Penh pada 15 September 2011. Yingluck dan Hun Sen sepakat untuk memperbaiki hubungan dengan cara menarik pasukan. Keputusan untuk menarik pasukan ini juga untuk mematuhi keputusan ICJ pada AMM ke-44.

### **Kesimpulan**

Konflik Preah Vihear yang terjadi antara Thailand dan Kamboja yang awalnya hanya sengketa wilayah dimana pada 1962 Thailand dan Kamboja sama-sama mengajukan perihal hak kepemilikan wilayah kepada Mahkamah Internasional. Tetapi, Mahkamah Internasional memutuskan bahwasanya Preah Vihear menjadi hak milik Kamboja.

Konflik yang terjadi antara kedua negara ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dibentuknya ASEAN yang telah dijelaskan dalam TAC 1967. Untuk itu, maka ASEAN harus turut andil dalam penyelesaian konflik ini dengan prinsip-prinsip resolusi konflik dan ASEAN Way yaitu menyelesaikan permasalahan memakai jalan damai dan tanpa kekerasan. Maka dari itu, ASEAN menjalankan proses perdamaian ini memakai *peacemaking* dimana mencapai kesepakatan perdamaian dengan memakai jalan fasilitasi dan mediasi dengan para pimpinan yang memiliki wewenang.



Adapun peran ASEAN sebagai *peacemaker* untuk menyelesaikan konflik Preah Vihear yaitu memfasilitasi pertemuan triteral antara Indonesia, Thailand dan Kamboja dan memediasi kasus ini dengan memasukkan kasus Preah Vihear ke dalam agenda pertemuan ASEAN.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

Ahmadi, Surwandono dan Sidiq. *Resolusi Konflik di Dunia Islam*. Yogyakarta: Graha Mulia, 2011

Armadita, Eko Huda & Fadila Fikriani. "KTT ASEAN Bahas Konflik Thailand-Kamboja." 2011.

Galtung, Johan. "Three Approaches of Peace." *Peacemaking, Peacekeeping and Peacebuilding*, 1976.

Kim, Dean G Pruitt and Sung Hee. *Social Conflict : Escalation,Stalemate and Settlement*. McGraw-Hill Education, 2004.

Narine, Shaun. *Explaining ASEAN : Regionalism in Southeast Asia*. United State of America: Lynne Rienner Publisher, 2002.

VOLMAN, RUDOLF. "STRATEGI KAMBOJA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK KUIL ." *STRATEGI KAMBOJA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK KUIL* , 2014: 12.

## **Jurnal dan Laporan**

ASEAN. "ASEAN Defence Minister Meeting (ADMM) ." 2016.

ASEAN, Sekretariat Direktorat Jenderal Kerjasama. *ASEAN Selayang Pandang : edisi ke-9*. Jakarta: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2010.

Hermansyah, Rizky Novid. "Konflik Thailand Kamboja." *Konflik Thailand Kamboja*,

Nur, Raharjo Ikfal dan Sandy. "Menanti Diplomasi Tingkat Tinggi Indonesia dalam Konflik Thailand-Kamboja." 2011.

2010: 27.

UNESCO. " The Organization's History." 2016.

## **Website**

Indonesia, BBC. *PBB : Tarik Pasukan Thailand-Kamboja*, 2011.

Indonesia, BBC. *Thailand Ajukan Syarat ke Indonesia*, 2011.